

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan merupakan sebuah ide yang senantiasa aktual dan relevan dalam panorama perkembangan manusia. Hal ini secara khusus merujuk pada dimensi otonomitas dalam pribadi manusia. Secara kodrati manusia adalah makhluk yang bebas (*free being*). Sebagai makhluk yang bebas, manusia memiliki keinginan untuk hidup merdeka tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Dengan demikian, kebebasan merupakan kebutuhan dasar manusia sejak adanya.

Tema kebebasan telah menjadi obyek kajian sepanjang zaman. Sejak zaman Yunani kuno hingga abad modern telah tampil pemikir-pemikir yang merenungkan hakikat kebebasan itu sendiri. Namun, harus diakui bahwa kesadaran penuh akan kebebasan baru timbul setelah refleksi berabad-abad. Pada zaman Yunani kuno khususnya, orang berpendapat bahwa keberadaan manusia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi seperti dewa-dewi. Manusia tidak dapat mengukur hidup sepenuhnya. Kesejahteraan sebagai tujuan hidup manusia dipandang sebagai nasib yang dianugerahkan dari atas dan bukan sebagai suatu tujuan yang diupayakan oleh manusia itu sendiri.¹

Berkaitan dengan manusia, kebebasan justeru menyingkapkan dan menyatakan keadaan batinnya (*inner side*). Karenanya kebebasan sebagai yang bertaut erat dengan realita hidup manusia, senantiasa mempengaruhi persepsi dan pandangan tiap-tiap pemikir. Namun, terlepas dari semua bentuk pemikiran tersebut, pada akhirnya semua akan bermuara pada satu penegasan bahwa pada manusia ada kebebasan.²

Secara umum, kata kebebasan sudah biasa diucapkan dalam pembicaraan sehari-hari. Misalnya seseorang menceritakan bahwa ia sudah bebas dari suatu tugas atau tanggung jawab, ia bebas dari penjara dan sebagainya. Atau juga ia berkata bahwa ia bebas untuk pergi, bebas untuk makan, membuat perjanjian dan sebagainya. Demikian pula sering dikatakan, misalnya, di dalam Negara kita ada kebebasan berbicara dan berorganisasi, kebebasan berpolitik, kebebasan beragama dan sebagainya. Saya biasanya dikatakan bebas sejauh mana tak ada orang yang ikut campur dalam apa yang saya lakukan. Kebebasan politik dalam pengertian ini

¹ DR. Nico Syukur Dister, OFM, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius1998), hlm. 16.

²Louis Leahy, *Manusia Sebuah Misteri*, (Jakarta: Gramedia,1989), hlm. 159-160.

berarti suatu wilayah di mana seseorang dapat bertindak tanpa dihalang-halangi oleh orang lain.

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan merupakan landasan utamanya. Hal ini diakui sebagai tujuan utama dari setiap demokrasi. Kebebasan dalam Negara demokratis dimengerti sebagai ketidakterikatan mutlak pada berbagai aturan, norma atau kaidah yang ada dan bukan pula diartikan sebagai kesewenang-wenangan. Misalnya saja orang merasa tidak perlu menaati kaidah atau norma pergaulan, contohnya dengan melakukan pergaulan bebas; sex bebas dan seterusnya. Ia merasa bebas atau memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Demikian juga orang merasa bebas jika ia tidak mau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Misalnya seharusnya ia membayar pajak, namun ia bebas untuk tidak membayarnya. Kebebasan yang disalahartikan atau disalahgunakan seperti ini adalah kesewenang-wenangan dan tanpa tanggung jawab. Dalam kebebasan yang sesungguhnya tidak berarti tidak ada keterikatan apa pun, melainkan ada keterikatan. Dengan kata lain, bebas sesungguhnya tidak mengandaikan adanya keterikatan pada norma-norma.³

Hal ini terkesan kontradiktif: kebebasan berarti tidak ada terikat sekaligus juga terikat. Tidak mungkin secara logis sesuatu itu bebas dan sekaligus tidak bebas. Bebas dalam dirinya sendiri mengandung makna tidak terikat, lepas. Meskipun demikian, yang dimaksud tidak bertentangan dengan keterikatan tersebut sebetulnya dalam arti ketika kebebasan itu mau dilaksanakan, di sini mesti diperhatikan norma-norma pembatas perilaku tertentu. Ketika orang bertindak secara baik, dalam batas yang ditentukan baginya, maka ia berada dalam kebebasan sejati melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma atau kaidah yang ada.

Dalam perkembangan pemikiran tentang kebebasan, terdapat berbagai macam anggapan, pendapat dan pandangan yang terjelma dalam berbagai bentuk aliran pemikiran. Dari berbagai bentuk aliran pemikiran tersebut, muncul aliran utilitarianisme yang juga secara khusus menelaah keadilan dalam perspektif khasnya. Dan salah satu pemikir ternama utilitarian yang menelaah kebebasan secara khusus adalah John Stuart Mill. Dalam esai *On Liberty* (1859), ia menyuguhkan pembelaan yang semangat dan mempesonakan tentang kebebasan manusia. Tujuan pokoknya adalah menunjukkan bahwa bahaya yang mengiringi demokrasi dan menunjukkan bagaimana bahaya tersebut bisa dihindari.⁴

³Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm. 286-287.

⁴Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani sampai Zaman Modern*, Penerj: Ahmat Baidlowi dan Imam Bahehagi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 458.

Pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan sangat terkait dengan filsafat utilitarian dengan premis psikologisnya bahwa orang pasti mencari pemenuhan kebutuhannya sendiri. Menurut versi utilitarianismenya, manusia mencari bentuk kesenangan yang lebih tinggi, tujuan moralnya lebih pasti, dan kesadaran sosialnya lebih tajam hanya jika mereka memahami diri mereka dengan benar. Mill berpikir bahwa institusi dan praktik masyarakat yang terorganisir seringkali sangat menghalangi pencerahan dan kemajuan intelektual seseorang, dan konsekuensinya, kesenangan yang dicari manusia seringkali mempunyai tingkat yang rendah. Mill mendasarkan pembelaannya untuk kebebasan demokratis, dengan menegaskan, antara lain bahwa kebebasan berpikir dan bertindak akan mendorong perbaikan terus-menerus dalam kebahagiaan umat manusia. Gagasan-gagasan yang baik akan mengalahkan gagasan yang buruk, cara-cara hidup yang lebih baik, yang ditemukan melalui eksperimentasi yang hanya dimungkinkan dalam sebuah masyarakat bebas, akan mengalahkan cara-cara hidup yang buruk.⁵

Dengan melacak sejarah hak-hak individu dan otoritas Negara, Mill mencatat bahwa di masa lampau, kecuali Yunani Kuno, hubungan antara penguasa dan rakyat dipandang sebagai bersifat antagonis. Keyakinan bahwa pemerintah merepresentasikan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat mendorong terbentuknya berbagai lembaga konstitusi penyeimbang pada penguasa. Mill melihat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa dipandang sebagai sesuatu yang sangat berbahaya: kekuasaan dipandang sebagai senjata yang digunakan untuk menindas bawahannya yang lemah.⁶ Karena itu Mill berasumsi bahwa perlu adanya suatu upaya untuk menjaga individu dari kekejaman para penguasa. Mill mengatakan demikian:

Untuk mencegah anggota-anggota masyarakat yang lebih lemah menjadi mangsa burung nasar yang tak terbilang banyaknya, perlulah bahwa ada seekor burung nasar pemangsa tetapi yang lebih kuat daripada yang lainnya, dan bertugas untuk menekannya. Tetapi karena raja burung-burung nasar itu tidak kurang ganasnya memangsa kawan burung serta binatang-binatang yang lebih kecil lainnya, maka perlulah untuk terus menerus mempertahankan diri terhadap ancaman paruh dan cakarannya. Karena itu tujuan para patriot adalah membatasi kekuasaan yang harus dipatuhi oleh penguasa atas masyarakat. Pembatas inilah yang mereka maksudkan dengan pembebasan.⁷

Di sini yang dimaksudkan dengan pembebasan ialah perlindungan terhadap kekejaman para penguasa politik terhadap setiap individu⁸, agar individu

⁵Diane Revitch dan Abigail Thernstrom (edit), *Demokrasi klasik & Modern*, Penerj:Hermoyo (Jakarta: Obor , 2005), hlm. 117.

⁶John Stuart Mill, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷*Ibid.*, Di sini yang dimaksud *patriot* oleh Mill ialah para pencinta tanah air, dimana mereka itu, selalu berusaha untuk memperjuangkan kebebasan setiap individu yang ditindas oleh para penguasa. Bdk. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 258.

⁸John Stuart Mill, *Op.Cit.*, hlm. 2.

bebas dari tekanan atau hambatan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.⁹ Sehingga para penguasa tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengekang setiap individu, terkungkung dalam ketakutan, dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Isaiah Berlin, kebebasan yang diajarkan oleh Mill adalah kebebasan negatif (*bebas dari*), karena kebebasan yang dimaksud ialah situasi di mana tidak adanya tekanan, hambatan, paksaan atau kekangan dari luar diri kita.¹⁰ Kebebasan yang diajarkan oleh John Stuart Mill, bukan pula kebebasan, *asal semauanya sendiri*, yang sering mendapat stigma liberal. Kebebasan yang diajarkan Mill juga bukan berarti kontrol ketat di segala lini kehidupan masyarakat oleh negara, sehingga daya-daya cipta masyarakat (*civil society*) harus tetap tertindas di bawah dominasi otoritas pemimpin Negara.

Dalam kenyataan sekarang ini, terutama di negara tercinta Indonesia, kebebasan ini kadang dikonotasikan kurang tepat; diasosiasikan dengan cara hidup yang terlalu bebas, seks bebas, dan segala hal yang buruk. Ringkasnya: diidentikkan dengan liar. Padahal kebebasan itu bermakna positif. Kebebasan mengandaikan makhluk yang secara alamiah memiliki kemampuan untuk berpikir, untuk merasa, dan untuk memilih bagi dirinya sendiri. Karena itu, kebebasan jika diterjemahkan sebagai sebuah sistem pengaturan masyarakat, berarti sistem yang percaya bahwa individu-individu yang ada dalam suatu masyarakat sesungguhnya bisa menggunakan kemampuan dan harkat mereka secara alamiah, serta mampu memilih bagi diri mereka sendiri.

Berdasarkan uraian tentang kebebasan yang demikian, maka penulis tertarik untuk menelaah konsep kebebasan menurut John Stuart Mill dalam tulisan ini dengan judul: **KONSEP KEBEBASAN PERSPEKTIF JOHN STUART MILL**

⁹Bdk. Ali Mudhofir, *Kamus istilah Filsafat dan Ilmu*, (Yogyakarta: Gadjah Madah University Press, 2001), hlm. 154-155.

¹⁰Isaiah Berlin, *Four Essays On liberty; Empat Esai Kebebasan*, Penerj: A. Zaim Rofiqi, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004), hlm. xvii.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis menentukan beberapa pokok permasalahan sebagai *status questiones* gagasan pembahasan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kebebasan menurut John Stuart Mill?
2. Bagaimana relasi antara kebebasan dan batas-batas kebebasan?
3. Bagaimana implikasi konsep kebebasan John Stuart Mill bagi kehidupan masyarakat sipil?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang mau dicapai dalam tulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan di atas antara lain menjawab problem apa itu kebebasan, bagaimana relasi kebebasan dan batas-batasnya dan bagaimana implikasinya bagi kehidupan masyarakat sipil, berdasarkan John Stuart Mill.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Akademis

Tulisan ini merupakan karya penulis sebagai seorang mahasiswa pada Fakultas Filsafat guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam bidang Filsafat. Di samping itu, untuk mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa Fakultas Filsafat.

1.4.2 Institusional

Karya ini merupakan proses pencarian pengetahuan ilmiah serta upaya pengembangan dan kemajuan ilmu secara integral. Karena itu tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pembentukan citra ilmiah lembaga pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang secara umum dan secara khusus bagi pengembangan dan pembentukan citra ilmiah pada Fakultas Filsafat. Kiranya tulisan ini memberi suatu kontribusi yang memiliki kualitas berguna dan menjadi titik acuan bagi mahasiswa Fakultas Filsafat dalam membuka wawasan berpikir mengenai konsep dari tulisan ini.

1.4.3 Sosial

Pemikiran John Stuart Mill mengenai kebebasan ini memiliki kontribusinya yang sangat besar bagi konsumsi masyarakat umum. Konsep ini

tidak hanya sebuah pengetahuan konseptual atau teoritis melulu melainkan konsep ini dimaksud agar masyarakat lebih mengusahakan dan menyadari akan kebebasan dalam diri setiap individu dan berjuang terus menerus untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Masyarakat yang memahami dan menyadari akan pentingnya menghormati kebebasan dapat menginternalisasikan dan mewujudkan dirinya dalam penghayatan hidup sehari-hari. Individu yang mampu memahami dan mengerti tentang pentingnya menghormati kebebasan yang dimiliki setiap orang akan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan dalam masyarakat. Individu-individu yang mampu menghargai dan menghormati kebebasan setiap pribadi akan melahirkan suatu masyarakat yang sungguh sejahtera dan bahagia dalam hidup.

1.4.4 Personal

Penulis sungguh menyadari bahwa tulisan yang dibuat ini bukan hanya sekedar sebagai sebuah tugas akhir yang perlu penulis penuhi sebagai seorang mahasiswa melainkan sebagai suatu ukuran bagaimana penulis dapat merumuskan pikiran melalui wadah ini secara kritis, metodis, sistematis dan reflektif. Dari sini penulis juga mau menimba nilai-nilai aplikatif dari konsep pemikiran dalam tulisan ini terutama mengenai kebebasan-kebebasan yang perlu dimiliki oleh setiap orang dalam hidup di suatu masyarakat. Oleh karena itu penulis tidak hanya mengenai konsep dari tokoh ini melainkan berusaha mencari padanan relevansi terkhusus dengan membuat contoh-contoh konkret yang bisa dipahami dengan baik mengenai konsep ini.

1.5 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Penulis sedapat mungkin berjuang dengan selektif memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan topik tulisan ini. Dari literatur-literatur itu, penulis berusaha mengumpulkannya kemudian mendalami atau meneliti konsep dari karya-karya asli John Stuart Mill. Penulis pun berjuang menganalisis konsep pemikiran melalui studi-studi atas tema ini dan membuat sintesis untuk menemukan pemahaman baru. Penulis akhirnya membuat penilaian kritis tentang konsep ini dengan menekankan kontribusi pemikiran John Stuart Mill bagi pelayanan publik dan juga mengemukakan penilaian kritis mengenai kelemahan teorinya. Penulis juga mengikuti metodologi yang digunakan oleh Mill sebagai aturan dasar penyelidikan ilmiah yaitu metode persamaan, metode perbedaan, metode gabungan antara perbedaan dan persamaan, metode residu dan

metode variasi beriringan.¹¹ Metode-metode ini penulis gunakan sebagai suatu bentuk penilaian kritis terhadap teori ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini secara sistematis disajikan dalam lima pokok besar yang terdiri dari: Bab I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Metodologi Penulisan dan Sistematika Penulisan. Penulis mengklarifikasikan tentang mengapa, untuk apa, bagaimana menulis tentang tema mengenai Kebebasan dalam kaca mata John Stuart Mill.

Bab II memuat bagian Biografi Intelektual John Stuart Mill. Dalam bab ini, penulis menggambarkan riwayat singkat John Stuart Mill dan karya-karyanya. Selanjutnya, penulis juga sedikit mengulas tentang latar belakang pemikirannya yang didalamnya memuat situasi pemikiran yang dialami Mill pada masanya, serta pemikiran-pemikiran para filsuf yang turut mempengaruhi pemikirannya. Pemikiran-pemikiran yang dimaksud berasal dari beberapa filsuf pendahulunya yakni Jeremy Bentham dan ayahnya James Mill.

Bab III berbicara tentang Landasan Teoritis Pemikiran Etika Politik John Stuart Mill. Di sini penulis berusaha menguraikan perjalanan Filsafat Politik yang di gagas oleh Mill dalam sumbangsuhnya terhadap sistem pemerintahan yang baik dan bagus. Di mana yang menjadi titik tolaknya ialah Filsafat Utilitarian yang dianutnya, sehingga akhirnya ia bisa merumuskan tentang Konsep Kebebasan yang menjadi titik inti dari tulisan ini.

Bab IV merupakan inti tulisan ini. Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang Konsep Kebebasan menurut John Stuart Mill. Akhirnya dalam Bab V

¹¹Ada lima prinsip induksi yang dilontarkan oleh John Stuart Mill sebagai aturan dasar penyelidikan ilmiah. Kelimanya itu adalah: Pertama, *Metode Persamaan*. Jika dua kasus suatu fenomena mengandung satu ciri yang sama, maka ciri itu mungkin penyebab fenomena atau efeknya. Kedua, *Metode Perbedaan*. Jika dalam sebuah kasus suatu fenomena muncul, namun pada kasus lain tidak, dan dalam perbedaan itu mengerucut kesatu ciri yang sama, maka ciri itu penyebab fenomena atau efeknya. Ketiga, *Metode gabungan persamaan dan perbedaan*. Metode ini memadukan dua metode terdahulu. Keempat, *Metode Residu*. Jika kita menyorikan dari sebuah fenomena yang sudah diketahui merupakan efek dari sejumlah kejadian sebelumnya, maka sisanya adalah hasil dari antesedennya. Kelima, *Metode Variasi Beriringan*. Fenomena yang berbeda mungkin saja berkaitan lewat sejumlah hubungan kausal. Meski metode-metode ini cukup baik menghasilkan pengertian ilmiah, namun mereka bergantung pada analisis sebelumnya terkait faktor-faktor yang relevan, dan tidak bisa diaplikasikan langsung pada kasus-kasus di mana penyebab bergerak lebih holistik, atau dalam kebijakan suatu bidang yang mengandung faktor-faktor yang saling mengunci. Simon Blackburn, *The Oxford Dictionary of Philosophy: Kamus Filsafat*, Yudi Santoso (Penerj), (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 561.

sebagai bab kesimpulan dan penilaian kritis. Penulis memberikan kesimpulan dan penilaian kritis yang merupakan hasil upaya penulis dalam memaparkan topik ini.